



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DENPASAR**



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat asung kertha wara NugraNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas tahun 2021 – 2026 selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang mengacu dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tidak terlepas dari



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

kerjasama dan kerja keras semua pihak baik masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini ada manfaatnya sebagai acuan dalam evaluasi kinerja sekaligus dalam penentuan kebijakan maupun pengambilan keputusan untuk mencapai optimalisasi kinerja .

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 24 Pebruari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19660311 199503 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	ii
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Gambaran Umum _____	4
1.3. Isu-Isu Strategis _____	5
1.4. Struktur Organisasi _____	13
1.5. Sistematika Penulisan _____	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan _____	17
2.2. Perjanjian Kinerja _____	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja _____	28
3.2. Analisis Capaian Kinerja _____	31
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Nasional _____	57
3.4. Realisasi Anggaran _____	61
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan _____	73
4.2. Saran _____	74



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lampiran-Lampiran

1. Struktur Organisasi
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kuantitas dan kualitas program pembangunan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya instansi pemerintah (OPD) yang menjadi lembaga pelaksana program pembangunan di daerah. Banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dan masyarakat, dimana khususnya Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan harus mampu menciptakan system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui program pembangunan dapat terwujud. Prinsip “Good Governance” atau pemerintahan yang baik bercirikan pembangunan yang mengutamakan profesionalitas, transparan, efektif, efisien, akuntabel, pelayanan prima, demokratis dan adanya supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2021 – 2026, Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 – 2026, Renja Dinas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 , serta mengacu pada Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta hasil review sasaran dan Indikator RPJMD Kota Denpasar maka penyusunan LKjIP tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk tercapainya hal itu, kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar selama kurun waktu 5 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 senantiasa berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPPA dan PPKB Kota Denpasar 2021-2026.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dalam Undang undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa aza-azas umum penyelenggaraan Negara, meliputi: azaz Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Profesionalisne, dan azas Akuntabilitas. Azas Akuntalibitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, pihak yang diwajibkan menyampaikan LKjIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan urusan wajib konkuren non pelayan dasar dipimpin oleh pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan pada tahun bersangkutan.

Sebagai Dinas yang mempunyai urusan wajib non pelayanan dasar maka Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPAPPKB 2023



1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

2. Tujuan :

- a) Memberikan Informasi mengenai capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.
- b) Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk perbaikan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
- c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dituntut untuk meningkatkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan langkah



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan di 2 bidang yang merupakan 2 urusan wajib pemerintah daerah ini maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Atas **Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021** tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi :

TUGAS POKOK :

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mendapat beberapa tantangan dan masalah yang harus dihadapi dalam meningkatkan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ,dan Permasalahan –permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Permasalahan terkait dengan kesekretariatan :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Belum Optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar
3. Kurang memadai sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPAPPKB 2023



4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang
5. Belum Optimalnya Kualitas administrasi, dokumen Keuangan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

b. Permasalahan terkait dengan kualitas hidup perempuan :

1. Kurangnya optimalnya peran Kelembagaan PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar
2. Kurang optimalnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender di Kota Denpasar
3. Belum tersedianya data terpilah
4. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat, kepemimpinan dan peran perempuan dalam jabatan politik dan publik serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

c. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spectrum yang semakin luas
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga

d. Permasalahan yang terkait dengan Kualitas Keluarga :

1. Perlunya peningkatan Peran Ibu dalam pengasuhan Keluarga
2. Belum optimalnya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

e. Permasalahan yang terkait dengan Sistem Data Gender dan Anak:

1. Rendahnya presentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak
2. Masih kurangnya data permasalahan perempuan dan anak



f. Permasalahan yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Belum optimalnya Partisipasi anak dalam Pembangunan (partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan)
2. Masih adanya perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun
3. Keberadaan dan Pemanfaatan pojok ASI belum maksimal
4. Ketersediaan lembaga yang memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) kesehatan Psikologi dan mental belum memadai
5. Belum optimalnya sekolah Ramah Anak dan RBRA di kota Denpasar

g. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Khusus Anak

1. Tingginya Kasus Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik
2. Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti : pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus
3. Dampak pandemi covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.
4. Adanya pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja
5. Belum optimalnya PATBM di Kota Denpasar

h. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Penduduk

1. Belum adanya kajian pengendalian penduduk

i. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB)

1. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
2. Kebutuhan ber - KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani
3. Partisipasi KB Pria yang masih rendah



4. Jumlah penduduk usia produktif dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia Non produktif akan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Bonus Demografi)
5. Adanya Kesenjangan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) antara pedesaan dan perkotaan
6. Pendataan keluarga (PK) agar tata kelola data pemerintah belum menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
7. Rendahnya pengetahuan remaja mengenai perilaku beresiko seperti seks pra nikah, pernikahan dini dan Napza
8. Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja masih perlu di tingkatkan

j. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Sejahtera

1. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga
2. Belum optimalnya Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa
3. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja da perawatan jangka panjang lansia
4. Belum optimalnya pemahaman keluarga tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

1.3.1 Analisis Internal dan Eksternal

Berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi sesuai dengan isu strategis yang berkembang saat ini dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melakukan kajian internal dan eksternal melalui Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :



Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: misi ke 5 “Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali”</p> <p>Tujuan: Meningkatkan Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Budaya Bali</p> <p>Sasaran: Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>Strategi : Meningkatkan Kesetaraan Gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Baru 50 % OPD yang terlibat dalam pelaksanaan PPRG; (2) Komposisi ARG daLam Belanja Langsung APBD masih dibawah 30 % ➢ Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya ➢ Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT ➢ Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga ➢ Belum Optimalnya Kelembagaan PUG ➢ Tersedianya data terpilah belum maksimal ➢ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan ➢ Belum optimalnya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga ➢ rendahnya presentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak ➢ belum optimalnya PHA di 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ➢ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender ➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ➢ Masih rendahkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang KRR dan KB ➢ Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ➢ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A ➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembankan Kota Layak Anak ➢ Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program pengendalian



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		<p>Kota Denpasar</p> <ul style="list-style-type: none">➤ belum terbentuknya FAD di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan➤ Belum optimalnya sekolah Ramah Anak/RBRA di kota Denpasar➤ belum optimalnya PATBM di Kota Denpasar➤ Belum adanya kajian pengendalian penduduk ➤ Rendahnya pengetahuan masyarakat ttg pelayanan KB➤ masih rendahnya PUS ttg PKBR➤ belum maksimalnya ratio PKB dengan jumlah Desa/kelurahan➤ masih rendahnya pengetahuan dan informasi KB pria➤ belum optimalnya pemanfaatan Poktan Tri Bina➤ belum optimalnya pembentukan PIK R di Desa/Kel	<p>pemamfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Belum adanya kajian pengendalian penduduk	<p>n penduduk dan keluarga berencana</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan motivator KB pria dan sosialisasi➤ Meningkatkan pemahaman dan peran keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera
--	--	--	---	---

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;



- 2) Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- 3) Memperkuat sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- 4) Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
- 5) Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak; edukasi dan teregistrasi keberadaan dan Komitmen SRA dan meningkatkan sarpras, program dan kegiatan SRA, memberi edukasi dan teregistrasi kegiatan kreatif dan rekratif yang ramah anak, Daerah terkait, Kec, Desa/Kel, Dunia Usaha untuk bersinergi, memberi edukasi dan teregistrasi untuk meningkatkan keberadaan dan Pemanfaatan pojok ASI maksimal;
- 6) Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;



- 7) Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya
- 8) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
- 9) Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada day care/Tempat Penitipan Anak;memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) dan Kesehatan mental;
- 10) Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- 11) Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT
- 12) Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;



- 13) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
- 14) Peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan jangkauan pelayanan KB
- 15) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan
- 16) Pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- 17) Peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data/informasi program Bangsa Kencana berbasis teknologi informasi
- 18) Peningkatan pemahaman remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.



FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak; Kelompok Jabatan Fungsional.



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai berikut :

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar terdapat pada **lampiran 1**.



1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan, Gambaran umum, isu strategis yang menguraikan tentang potensi dan kelemahan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Struktur Organisasi , juga menjelaskan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Denpasar.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, program serta kegiatan serta Perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pencapaian sasaran, pencapain kinerja ,keberhasilan dan kegagalan yang telah diperoleh dengan membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya dan target sasaran.

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari semua laporan yang juga berisikan saran kepada semua pihak,dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar diawali penyusunannya mulai Tahun 2016-2021. Dengan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Atas **Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021** tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar disusun sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan dibidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perelindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara umum sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar meliputi Visi, Misi, Sasaran dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, program serta kegiatan :



2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju .“

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026, yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota yang dimaksud dalam RPJPD adalah budaya yg bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak lagi sesuai dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertical ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa memastikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

2.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan focus RPJMD periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arah RPJPD, focus RPJMD periode Tahun 2021-2026 dan guna



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali,

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana bertujuan Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana



3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) bertujuan optimalisasi pelayanan publik
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, bertujuan mewujudkan SDM yang unggul, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mewujudkan keseimbangan pembangunan
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali, bertujuan Meningkatkan penguatan jati diri masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mendukung pencapaian **misi ke 5 “Penguatan Jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali”**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dan strategi Meningkatkan kesetaraan gender.

Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



2.1.3. Tujuan, Sasaran , Straategi, dan kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dengan berdasarkan pada kriteria – kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan strategis dapat diukur apabila memiliki indikator kinerja yang terukur. Di tempuh melalui strategis dan sasaran strategis.Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menyusun Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenaca Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus	Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di lembaga, pemerintah , Dunia Usaha di Kota Denpasar, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;	Percepatan Kebijakan pemenuhan Hak Anak Kota, Desa/Lurah melalui penguatan kelembagaan pemenuhan Hak Anak, dan pendampingan dalam perencanaan program kegiatan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasi



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.		Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak ; Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan	Meningkatkan kebijakan dan regulasi, meningkatkan pemahaman terhadap Pemerintah, Dunia Usaha, pendidik dan media masa tentang pentingnya perlindungan khusus anak.
		Memperkuat lembaga UPTD PPA, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan sertifikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; dan Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.	Meningkatkan peranan UPTD dalam sistem pelayanan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, serta pemulangan dan meningkatkan pengawasan.
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;	Kebijakan Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;	



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	<p>Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</p>	<p>Kebijakan Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</p>
	<p>Peningkatan Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p>	<p>Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, revidi, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p>
	<p>Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lembaga, pemerintah kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;</p>	<p>Percepatan Kebijakan pelaksanaan PUG di lembaga, pemerintah kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG),</p>
	<p>Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;</p>	<p>Kebijakan Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.</p>
	<p>Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.</p>	<p>Memperkuat Kebijakan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.</p>
	<p>Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT</p>	<p>Percepatan kebijakan Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT</p>



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR)	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tenram dan bahagia (keluarga berkualitas melalui pola asuh, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan perawatan ramah lansia
		Peningkatan akses layanan kontrasepsi , termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan jangkauan pelayanan KB	Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dengan sasaran akseptor KB, keluarga peserta MKJP
	Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility rate/TFR)	Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
		Peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data/informasi program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM PLKB	Peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data/informasi program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi

2.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah Melaksanakan 10 Program dan 25 Kegiatan Pada Tahun 2023 antara Lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Kegiatan :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dengan Kegiatan :

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota



- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
 3. Program Perlindungan Perempuan.
Dengan Kegiatan :
 - 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Dengan Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 6. Program Pemenuhan Hak Anak
 - 1) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 7. Program Perlindungan Khusus Anak
-



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Penduduk
- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 3) Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kersertaan Ber KB
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



II.1.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan perencanaan Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan selaras dengan perencanaan Strategis OPD yang tertuang didalam RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Disamping itu penyusunan rencana kinerja tahunan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen OPD untuk mencapainya dalam tahun bersangkutan seperti tertera pada Lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023, **Lampiran 2**

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun tertentu (2023) dengan mempertimbangkan sumber yang ada. Tujuan Perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada **lampiran 3**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi dan tujuan organisasi. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, disamping juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengembal amanah dan pelaksana pembangunan seperti yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan berjalannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai upaya perbaikan kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai unit pelaksana Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyusunan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi lima komponen manajemen kinerja meliputi : Perencanaan kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan yang



dilakukan melalui analisis perbandingan rencana kinerja terhadap realisasi kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan ditetapkan berdasarkan standar penilaian dari hasil pengukuran yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	0-30	Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja sehingga diperoleh informasi tingkat keberhasilan dan alasan penyebab tercapainya target kinerja maupun belum tercapainya target kinerja pada tahun berjalan.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sesuai Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menetapkan 3 sasaran dan 4 indikator kinerja (out come) dimana sasaran “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan merupakan Strategi Kota Denpasar yang termuat dalam RPJMD dengan 2 Indikator ” angka IPG, angka IDG. berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	- Predikat Kota , Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)



3.2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar selaku pengembal amanah dari masyarakat Kota Denpasar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang bersifat administratif akibat perubahan kebijakan internal.

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dapat dilihat tabel berikut ini :



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023 serta perbandingan capaian sasaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	Utama	Utama	100 %	Sesuai target
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,77	96,88	96,77	96,92	100,15%	Diatas target
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,16	67,02	62,16	67,21	108 %	Diatas target
3	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)			56,80	59,69	105 %	Diatas target



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung indikator kinerja dan menjadi tanggung jawab hingga akhir tahun 2023

Program dan Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Predikat Kota , Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak	Utama	Utama	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
						Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kabupaten/kota	100 Layanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
						Penguatan dan Pengembangan Sinkronisasi Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
					Program Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Organisasi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100%
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,77	96,92	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG	36 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota 36 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
					Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 % Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 % Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
						Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pembangunan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%
					Indeks Pemberdayaan	62,16	67,21	Program Pengarusutamaan	Pemberdayaan Perempuan Bidang	Sub Kegiatan Sosialisasi Partisipasi Peningkatan



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		Gender (IDG)			n Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, umlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah DEsa/Kel ,Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	1 Dokumen Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, umlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah DEsa/Kel ,Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	100%
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100% Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualiyas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100% Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

					Kesejahteraan Keluarga		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal</p> <p>Sub Kegiatan Advokasi Program KBKK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja</p> <p>Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBKK sesuai kearifan budaya lokal</p> <p>Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KBKK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	<p>4 Organisasi</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <p>1 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>1 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	<p>4 Organisasi</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <p>1 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>1 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

						<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBKK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)</p>	<p>5 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p>	<p>5 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p>	<p>100%</p>
						<p>Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBKK</p>	<p>6 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</p>	<p>6 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</p>	<p>100%</p>
						<p>Sub Kegiatan Pengendalian Program KBKK</p>	<p>3 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</p>	<p>3 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</p>	<p>100%</p>
					<p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p>	<p>Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</p>	<p>100%</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</p>	<p>100%</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</p>	<p>100%</p>
						<p>Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p>	<p>8 Organisasi</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana</p>	<p>8 Organisasi</p> <p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program</p>	<p>100%</p>



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.365 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.365 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%
						Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%
						Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	40 orang Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 orang Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100%
					Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di	1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan	100%



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

					tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBKK di Kampung KB	Kampung KB 4 Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Lintas Sektor di Kampung KB 4 Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100%	
					Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Laporan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Laporan Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga 2 Dokumen Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Laporan Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga 2 Dokumen Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100% 100% 100% 100%



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dari 3 (tiga) sasaran strategis (4 indikator Utama), terdapat 3(tiga) capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan, dan 1 (satu) capaian kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan

3.2.1 Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	5	4	6
Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Predikat Kota , Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak	utama	utama	Utama	100 %

Kota Denpasar dalam Evaluasi Kota Layak Anak mulai dari tahun 2012 mendapat katagori Madya, tahun 2013 mendapat katagori yang lebih tinggi yaitu Nindya, tahun 2015 mendapat katagori, tahun 2016 hanya 3 Kota yang mendapat katagori Nindya yakni : Kota Denpasar, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta. Kota Denpasar s/d tahun 2018 bertahan di katogori Nindya di tahun 2019 – 2021 Kota Denpasar mendapat kategori Utama dan tahun 2023 masih tetap kategori Utama.



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sesuai tabel diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Kinerja Sesuai dengan Target di karenakan Realisasi Predikat Kota Layak Anak , Kecamatan desa/lurah layah Anak targetnya Utama , dimana Pemerintah Kota Denpasar Evaluasi Kota Layak Anak Mendapat **Katagori Utama** .

Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melaksanakan salah satu kegiatan inovasi yaitu membentuk PATBM (Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Desa / Kelurahan . penguatan dan pengembangan layanan peningkatan kualitas anak di sekolah (SRA), Puskesmas Ramah Anak, Sarana Prasarana anak di lingkungan masyarakat, pemenuhan hak anak berbasis masyarakat serta mendorong partisipasi anak dalam semua kegiatan

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Desa/Kelurahan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Tahun 2021 target pembentukan PATBM 23 % atau 10 PATBM dari 43 Desa/Lurah dengan realisasi sudah mencapai 25,58 % atau 11 PATBM dari target 2021 yang ditetapkan.

Sedangkan pada Tahun 2023 Target pembentukan PATBM 25% atau 11 PATBM dimana realisasinya mencapai 32 ,56 % atau 14 PATBM artinya sudah diatas target yang telah di tetapkan

Dan sudah terbentuk PATBM Mandiri di Kota Denpasar anantara lain : Kelurahan Sesetan, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Penatih Dangin Puri, Desa Sanur Kaja, Desa Tegal Harum, Desa Ubung Kaja, Desa Tegal Kerta, Kelurahan Kesiman. Desa Sanur Kauh, Desa Kesiman Petilan, Desa Dangin Puri Kangin., Desa Peguyangan Kaja , Desa Dauh Puri Kauh, Kelurahan Padangsambian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPAPPKB 2023



Tujuan PATBM untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan :

1. Memberikan informasi/sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang menerima membenarkan atau mengabaikan kekerasan.
2. Membangun system pada tingkat Komunitas dan Keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan
3. Menanggapi kekerasan yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak, melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban dan pelaku anak.

Untuk meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak , maka salah satu sasaran Dinas P3AP2KB adalah Meningkatnya kapasitas lembaga kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak Untuk mempercepat terwujudnya Predikat Kota Layak Anak di Kota Denpasar, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Kegiatan :

- Melakukan sosialisasi/ seminar kepada masyarakat, sekolah, lembaga kesehatan dan keluarga, pembentukan FAD Kecamatan/Kota semua - Kegiatan Forum Anak Daerah/ kegiatan Anak – anak
- Memfasilitasi kegiatan kegiatan anak-anak seperti HAN , Jambore Anak, Denfes serta berkoordinasi dengan OPD, APSAI mengenai kebutuhan anak-anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) , Sekolah Ramah Anak (SRA) dan lain-lain.



3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	5	4	6
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,77	96,88	96,92	100,15%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,16	67,02	67,21	108 %

Data IPG tahun 2022 realisasi 96,88 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 80 , sedangkan IPG tahun 2023 Target 96,77 realisasi 96,92 **meningkat** dari tahun 2022 sebesar **0,04**, IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sedangkan IPM Kota Denpasar Tahun 2023 adalah 84,68 sehingga di Kota menunjukkan bahwa tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Denpasar diikuti dengan capaian kesetaraan gendernya, tingginya pembangunan manusia yang dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang diperoleh juga.

- Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender (IPG) Target di Tahun 2023 96,77 dengan realisasi 96,92 pencapaiannya Diatas Target di Kabapten dan Kota Provinsi Bali Kota Denpasar Realisasi Paling tinggi 96,92 bahkan diatas realisasi Provinsi Bali sebesar 94,36 , dimana pemerintah Kota Denpasar dalam Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(APE) atau Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Denpasar mendapat **Kategori Mentor**, untuk diketahui hanya 3 Kota di seluruh Indonesia yang mendapat kategori mentor yaitu Kota Denpasar, Kota Surabaya, dan Kota Semarang.

Sedangkan data IDG tahun 2021 adalah 67,26, IDG tahun 2023 yaitu target 62,16 realisasi tahun 2021 adalah 67,02. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tahun 2023 Dari target IDG 62,16 realisasi 67,21 ini dapat dilihat dari sudah ada peningkatan partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam pemilu tahun 2023 di Kota ada 4 (Orang) anggota Dewan Perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Denpasar masih sangat kecil yaitu 4 (empat) orang perempuan dengan perbandingan 4 dari 45 Orang anggota Walaupun sudah ada afirmasi action kota 30 % untuk keterlibatan perempuan di legislative tapi keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah. Afirmatif 30% tidak menjamin keterlibatan perempuan dalam partisipasi dalam politik, karena kurangnya keterlibatan perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dimana masyarakat Bali menganut budaya **patriarkhi** dan khususnya di Kota Denpasar serta faktor internal perempuan itu sendiri juga mempunyai pengaruh yang besar. Untuk meningkatkan partisipasi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan Advokasi, Sosialisasi, Pelatihan Terkait Dengan Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik dan Politik.

- Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi, dimana realisasi IDG **67,21** ditas target (62,16) namun realisasi IDG Kota Denpasar masih lebih rendah dari pada Realisasi Provinsi Bali (72,29) bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupten lainnya yaitu) Kab. Jembrana (72,40) Kab. Tabanan (78,51), Kab Badung (76,33) Kab. Gianyar (68,58) Kab. Klungkung (75,75) Kab Bangli (65,69) , Kab. Karangasem (64,59), Kab. Buleleng (73,73)

Pesentase ARG dalm APBD tahun 2023 mencapai 19,38 % dimana jumlah ARG pada Belanja Operasional dan Modal APBD di bagi Jumlah Seluruh belanja Operasional dan modal di APBD kali 100 % , berdasarkan evaluasi PPRG, dimana tiap OPD telah menyusun anggaran yang responsive gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunannasional; ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Sedangkan Pesentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG tahun 2021 targetnya 86% sedangkan realisasi 100% dengan capaian kinerja 116,28% artinya seluruh OPD pada Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan PPRG. PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPAPPKB 2023



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan

Untuk ketersediaan data terpilah di masing-masing perangkat adalah daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak tahun 2023 targetnya 90 % sedangkan realisasi 100% artinya pencapaiannya 111,11%. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan Renstra OPD telah menggunakan data terpilah laki-laki dan perempuan. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga sudah tersedia data terpilah dalam bentuk buku profil statistic gender dimana data terpilah ini diperoleh dari OPD terkait. Profil statistic adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan dan hubungan relasi dan isu gender antara perempuan dan laki-laki. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender. Untuk keperluan pengarusutamaan gender (PUG),

Dalam Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pemerintah Kota Denpasar telah dievaluasi oleh Tim Independen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dari tahun 2013 , dan telah meraih penghargaan berturut-turut yaitu penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2013 dengan katagori Madya, tahun 2014 dengan Katagori Utama dan Tahun 2016 dengan Katagori Mentor dan tahun 2018 mendapat katagori Utama Tahun 2019 Mendapat Utama sedangkan tahun 2021 Katagori Utama. Dengan perhargaan diraih ini menyatakan Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Denpasar. Adapun strategi yang dipakai untuk mencapai ini adalah pengarusutamaan gender (PUG). Di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPAPPKB 2023



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

tahap perencanaan kebijakan dan program, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/ Pergub/ Perbub/ Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Lembaga UPTD PPA Kota Denpasar adalah Lembaga yang memfasilitasi pengaduan, pelayanan dan koordinasi rujukan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, termasuk pemberian pendampingan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum/ ada masalah psikososial. UPTD PPA bertujuan untuk memperdayakan kaum perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk penanganan kasus KDRT di Desa/Kelurahan sudah terbentuk Satgas PA (Satuan Tugas Perlindungan Anak) yang terdiri dari unsur Satgas Kaling/ Kadus Desa/Kelurahan se- Kota Denpasar.

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sama dengan Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) artinya semua pengaduan yang di masuk ke UPTD PPA sudah ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jumlah kasus yang di tangani tahun 2021 adalah 252 kasus sedangkan kasus yang di tangani tahun 2023 adalah 252 kasus artinya kasus KDRT dan Anak tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2020 dikarenakan di era



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

pandemi covid 19 khususnya kasus Rumah Tangga Meningkat karena masalah Ekonomi yang dihadapi. Selain itu, dengan adanya inovasi Nayaka Prana (Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak) masyarakat dapat melaporkan kasusnya melalui media online sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus yang berdampak pula pada peningkatan jumlah kasus yang terlayani pada UPTD PPA.

3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Keluarga Berkualitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2023	REALISA SI 2022	REALISA SI 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56,80	56,80	59,69	105%

iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah, iBangga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan, iBangga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga stua wilayah.

iBangga diukur dengan 3 Dimensi, 11 Indikator dan 17 Variabel oleh BKKBN Pusat.

iBangga Kota Denpasar Tahun 2022 realiasasi 59,69

Bali realisasi 58,97 target 59,3

2021 realisasi iBangga Kota Denpasar 56,80, iBangga Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 0,89

CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang



menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.

CPR merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi. CPR memperhatikan semua sumber penyediaan (*supply*) alkon dan meliputi semua metode kontrasepsi. Umumnya CPR digunakan sebagai ukuran hasil Program Keluarga Berencana.

Secara teknis, CPR merupakan rasio, bukan rate atau angka. (Prevalensi/kelaziman diukur dengan rasio dan insiden/kejadian diukur dengan rate atau angka). Pada suatu tahun, pemakaian kontrasepsi mengukur persentase perempuan usia subur yang menikah yang menggunakan kontrasepsi. Untuk memperoleh angka pemakaian kontrasepsi yang benar, pembagi atau penyebut (*denominator*) harus mencerminkan penduduk yang beresiko (terhadap kehamilan), misalnya perempuan yang aktif secara seksual yang tidak mandul, tidak sedang hamil, atau masih subur. Pembilangnya harus mencerminkan jumlah pengguna kontrasepsi di populasi tersebut.

Realisasi CPR Tahun 2023 adalah 40,40 dari target 57,18 (pencapaian 70,65 %) dibawah dari target yang telah di tetapkan , CPR tahun 2021 adalah sebesar 77,26% dari target 65,15% dengan capain kinerja 118,58% atau di atas target.



KB PRIA

Pengertian Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Metode kontrasepsi pria adalah suatu cara yang dilakukan oleh pria untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menghambat masuknya sperma kedalam kemaluan wanita. Metode kontrasepsi pria yang banyak dikenal masyarakat ada 2 yaitu kondom dan vasektomi.

Kondom

Kondom adalah selubung/sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan seperti lateks (karet), plastik (vinil), dan bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis selama berhubungan seksual untuk menangkap semen selama ejakulasi dan mencegah sperma masuk kedalam vagina.

Vasektomi

Vasektomi adalah pemotongan vas deferens, yang merupakan saluran yang mengangkut sperma dari epididimis di dalam testis vesikula seminalis. Dengan memotong vas deferens sperma tidak mampu diejakulasikan dan pria akan menjadi tidak subur setelah vas deferens bersih dari sperma, yang memakan waktu sekitar tiga bulan.

- a. Keuntungan, sangat efektif dan aman, tidak ada efek samping jangka panjang, tindak bedah yang aman dan sederhana, efektif setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan dan diperlukan konseling.
- b. Kerugian, diperlukan tindakan operatif, kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti perdarahan atau infeksi, belum memberikan perlindungan total sampai spermatozoa, dan problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual mungkin bertambah parah setelah tindakan operatif.
- c. Kontraindikasi, pada ketidakmampuan fisik yang serius, masalah urologi, masalah hubungan dan tidak didukung oleh pasangan.
- d. Efek samping, dapat berupa infeksi, hematoma dan granuloma sperma.



Persentase KB Pria terhadap peserta KB Aktif tahun 2021 realisasi 5,58 % , dengan target 13 % sedangkan tahun 2023 realisasi 5,98% adapun pemakaian KB Pria sebagai berikut Pemakaian Kondon 3.689 , MOP 81, jumlah KB Pria 3.770 , Peserta KB Aktif 6.3024 realisasi 5,98 pencapaiannya meningkat dari tahun 2021

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) di bandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat, dan cara kontrasepsi di tambah dengan jumlah peserta KB Baru pada Tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB Aktif.

Persentase Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%.

Angka Unmetneed di tahun 2023 adlah 26,16 artinya unmetneed di tahun 2023 masih sangat tinggi dan harapan kedepan target menurunkan angka Angka Unmetneed dapat dicapai

Kegagalan :

Realisasi angka Pravelensi KONTRASEOSI modern (Modern Contraceptive Pravelance Rate /MPCR rendah di karenakan

1. Terjadi pencatatan dan pelaporan yang dilayani tidak dilaporkan sehingga data tidak direkam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi MKJP khususnya KB Pria



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Fertility Rate (TFR) : Pertumbuhan penduduk Indonesia belum mencapai kondisi ideal. Karena itu, wacana mengkaji ulang program dua anak perlu dicermati hati-hati. Perencanaan salah akan membuat Indonesia masuk dalam jebakan negara dengan pendapatan menengah.

Penduduk akan tumbuh seimbang jika angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur mencapai 2,1 anak. Itu berarti jumlah penduduk yang lahir dan meninggal sama. Struktur penduduk seimbang diperkirakan dicapai Indonesia pada 2025. Pada 2015, TFR Indonesia mencapai 2,28 anak setelah sejak 2001-2012 stagnan di 2,6 anak

Kebijakan tentang kependudukan mesti disusun dengan mempertimbangkan perubahan struktur penduduk Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi yang didapatkan Indonesia karena jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan usia muda dan usia lanjut akan maksimal. “Sekarang, bonus demografi di Indonesia yang menurut perkiraan awal akan sampai 2030, mungkin akan terjadi lebih panjang.

TFR perlu dipertahankan di angka 2,1. Jika dilonggarkan, bisa jadi proyeksi bahwa Indonesia akan tampil sebagai salah satu negara maju seperti yang pernah diprediksi oleh beberapa lembaga internasional tidak akan pernah terjadi akibat beban jumlah penduduk serta ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Negara bisa mempertahankan TFR 2,1 dengan harapan bonus demografi bisa diperpanjang karena dalam proyeksi, di satu sisi suplai usia produktif tetap akan terjamin dan di sisi lain tetap akan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (penduduk tumbuh seimbang).

Konsistensi TFR pada angka 2,1 bisa tercapai jika strategi pengendalian penduduk selalu ditempatkan dalam konteks membangun



keluarga yang berkualitas sesuai konteks daerah masing-masing dengan tujuan memaksimalkan hasil bonus demografi.

Dinas P3AP2KB untuk meningkatkan kuantitas keseimbangan penduduk dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dengan strategi menguatkan peran aktif koalisi kependudukan melalui perumusan kebijakan,advokasi, sosialisasi dan koordinasi. Pesentase Total Fertility Rate (TFR) rata-rata anak dalam keluarga target 2021 adalah 2,1 dengan realisasi 1,86 dibawah target yang telah ditetapkan. Sedangkan di tahun 2023 Total Fertility Rate (TFR) rata-rata anak dalam keluarga target 1,96 realisasi 1,83 di bawah target yang telah ditetapkan artinya pencapaiannya meningkat

Untuk meningkatkan kelompok masyarakat dalam pembinaan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga salah satu sasarnya melalui meningkatnya peran poktan dalam pembinaan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kunjungan BKB,BKR,BKL ke Kelompok Tribina . pembinaan tumbuh kembang anak yang meliputi program BKB (Bina Keluarga Balita) melalui kegiatan program ini akan lebih banyak peluang untuk memberikan pembinaan kepada keluarga yang memiliki Balita untuk meningkatkan mutu/kualitas kesehatan Ibu dan Anak.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak hanya terfokus pada pelayanan KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur melainkan juga melaksanakan .Pembinaan Ketahanan Keluarga. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang meliputi :

1. Bina Keluarga Balita yakni ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak usia balita dengan format kegiatan selain memberikan informasi mengenai tumbuh kembang balita juga diutamakan memberikan penyuluhan tentang alat kontrasepsi.
2. Bina Keluarga Remaja dalam bentuk BKR dan remaja-nya dalam bentuk PIK Remaja/PIK Mahasiswa dengan sasaran adalah keluarga



- yang memiliki remaja dan remaja-nya itu sendiri dalam upaya penyiapan Generasi Berencana sehingga para remaja dan orangtua dapat berkomunikasi positif agar para remaja terhindar dari perilaku negatif. Format kegiatan dalam kelompok ini adalah penyampaian informasi mengenai bagaimana memahami perkembangan pada remaja dan bagi remaja lebih diperlukan lagi informasi mengenai dampak negatif dari NAPZA, Seks Bebas dan HIV/AIDS. Hal penting khusus dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah bagi Pasangan Usia Subur yakni diberikannya penyuluhan tentang alat kontrasepsi.
3. Bina Keluarga Lansia yakni dengan sasaran keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana memahami perubahan-perubahan pada Lansia agar tetap bisa menghargai potensi yang ada pada penduduk lanjut usia. Yang utama dalam kegiatan ini juga adalah pemberian informasi mengenai alat kontrasepsi.
 4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan sasaran adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang memiliki usaha ekonomis. Seperti halnya kegiatan-kegiatan lainnya, pada UPPKS juga diutamakan pemberian informasi mengenai alat kontrasepsi.

Dari keseluruhan uraian tersebut jelas terlihat bahwa kegiatan pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga memiliki peran penting dalam membina kesertaan ber-KB. Oleh karenanya, keberadaan institusi-institusi ini harus terpantau dan terdata dengan baik dan benar. Namun hal ini, tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan sebab pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lapangan (baca : Kabupaten/Kota) sangat bergantung pada pemahaman pengelola di tingkat provinsi tentang peran dari kelompok-kelompok dalam program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



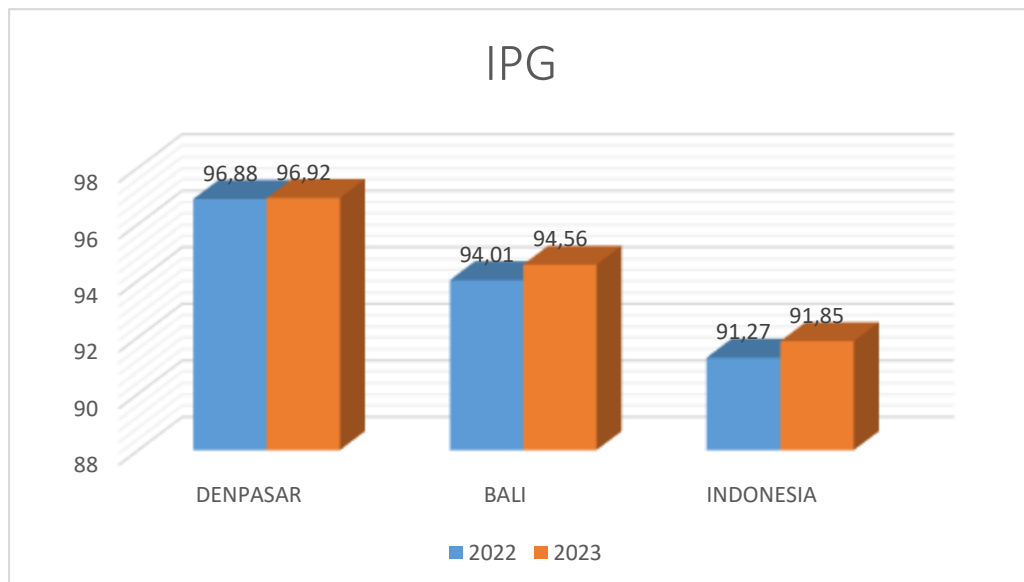
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN NASIONAL

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar rata rata diatas capaian nasional sebagai berikut :

3.3.1 Capaian Predikat Kota layak anak

Kota Denpasar dalam Evaluasi Kota Layak Anak mulai dari tahun 2012 mendapat katagori Madya, tahun 2013 mendapat katagori yang lebih tinggi yaitu Nindya, tahun 2015 mendapat katagori, tahun 2016 hanya 3 Kota yang mendapat katagori Nindya yakni : Kota Denpasar, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta. Kota Denpasar s/d tahun 2018 bertahan di katogori Nindya di tahun 2019 – 2021 Kota Denpasar mendapat kategori Utama dan tahun 2023 masih tetap kategori Utama.

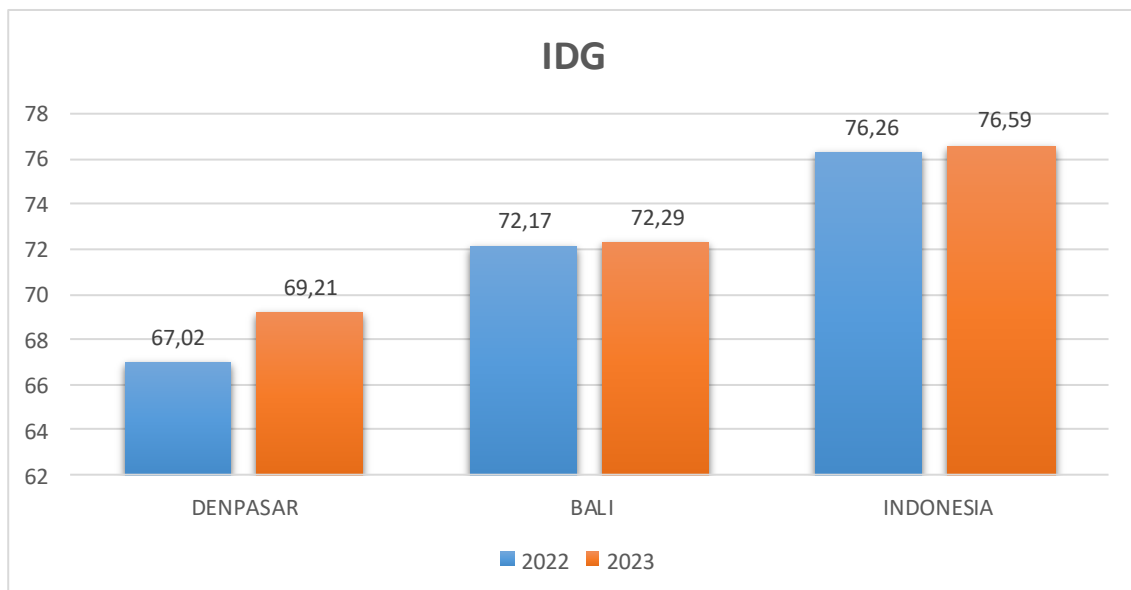
3.3.2 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)





Dilihat dari Diagram batang diatas IPG Kota Denpasar tahun 2022 capaiannya 96,88, IPG tahun 2023 Capaiannya 96,92 mengalami kenaikan 0,4 , jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi Bali di tahun 2023 (Capaian IPG Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 94,56) Kota Denpasar masih diatas lebih tinggi dari Provinsi Bali sebesar 2,36, bahkan jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional dimana Capaian IPG Nasional di Tahun 2023 sebesar 91,85 , capaian IPG Kota Denpasar juga diatas Capaian IPG Nasional sebesar 5,07 artinya di Tahun 2023 Capaian IPG Kota Denpasar (96,92) Lebih Tinggi Dari Provinsi Bali (94,56) atau 2,36 serta lebih tinggi dari Nasional (91,85) atau 5,07

3.3.3 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Dilihat dari Diagram batang diatas IDG Kota Denpasar tahun 2022 capaiannya 67,02 IDG tahun 2023 Capaiannya 69,21 mengalami kenaikan 2,19 , jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi Bali di tahun 2023 (Capaian IDG Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 72,29) Kota Denpasar Capaiannya dibawah Capaian Provinsi Bali sebesar 3,08,



bahkan jika dibandingkan dengan capaian IDG Nasional dimana Capaian IDG Nasional di Tahun 2023 sebesar 76,59 , capaian IDG Kota Denpasar juga di bawah Capaian IDG Nasional sebesar 7,38 artinya di Tahun 2023 Capaian IDG Kota Denpasar (69,21) dibawah Provinsi Bali (72,29) atau 3,08 serta dibawah capaian Nasional (76,59) atau 7,38, hal ini dikarenakan salah satu variable pengukuran indeks pemberdayaan Gender (IDG) yaitu keterlibatan perempuan di parlemen sangat kecil (perempuan di Kota Denpasar yang duduk dalam legislatif 4 dari 45 anggota DPRD)

3.3.4 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)



Dilihat dari Diagram batang diatas iBangga Kota Denpasar tahun 2022 capaiannya 56,80 dan capaian tahun 2023 meningkat menjadi 59,69 atau sebesar 0,89, jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi Bali di tahun 2023 (Capaian iBangga Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 58,97) Kota Denpasar diatas capaian Provinsi Bali sebesar 0,72 jika dibandingkan dengan capaian iBangga Nasional dimana Capaian iBangga Nasional di



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2023 sebesar 56,07 capaian iBangga Kota Denpasar diatas Capaian iBangga Nasional sebesar 3,62 artinya di Tahun 2023 Capaian iBangga Kota Denpasar (59,69) Lebih tinggi Dari Provinsi Bali (58,97) atau 0,72 serta lebih tinggi dari Nasional (56,07) atau 3,62

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Keberhasilan :

1. Penghargaan sebagai Kota Layak Anak Katagori Utama
2. Penghargaan Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur
3. Penghargaan Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) TK. Negeri Pembina Denpasar
4. Penghargaan Standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA DHARMA NEGARA KOTA DENPASAR) Peringkat Puspaga Utama
5. Penghargaan Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Janggan Kota Denpasar dengan Peringkat RBRA
6. Penghargaan Parahita Eka Praya (APE) Katagori Mentor
7. Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)
8. Penghargaan Nominasi Kota yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA)
9. Penghargaan Kota Denpasar dengan Cakupan KK Termuktahirkan 100%
10. Penghargaan Prevalensi Stunting Terendah
11. Penghargaan sebagai Juara I dalam Apresiasi Sistem Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (SIDAK KENCANA) Semester I Tahun Anggaran 2023
12. Penghargaan sebagai Juara I dalam Apresiasi Sistem Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (SIDAK KENCANA) Semester II Tahun Anggaran 2023
13. Penghargaan Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak Katagori Madya
14. Penghargaan sebagai Forum Anak Penerima DAFA Award Tahun 2023 Katagori Kota Terbaik

Kegagalan : -



3. 4 REALISASI ANGGARAN

III.4.1 Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka mengelola potensi pendapatan daerah yang diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang terukur dan rasional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar adalah salah satu unit teknis Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan termasuk ke dalam Satuan Kerja Daerah yang diserahi tugas dalam penyelenggaraan urusan wajib di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimana dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya tidak ada mengelola pendapatan sehingga pelaksanaan akuntabilitas keuangan terbatas pada pelaporan dan evaluasi Belanja Daerah.

Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Untuk mendukung kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 mengelola dana Rp. 20.710.778.285,- Rincian belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rincian Belanja berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase
1	Belanja Operasi	20.499.695.285,-	18.310.364.511,-	2.189.330.774,-	89,32 %
2	Belanja Modal	211.083.000,-	188.428.000,-	22.655.000,-	89,27 %
	Jumlah	20.710.778.285,-	18.498.792.511-	2.211.985.774,-	89,32%



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran dan program kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Program Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administarsi umum Perangkat Daerah	526.623.812	474.550.179
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.901.627	294.616.010
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.621.858	14.907.800
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	40.207.327	37.351.200
				d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	170.893.000	127.675.169
Persentase Penatausahaan Kepegawaian				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.080.161.784	1.958.602.976
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.600.000	84.828.456
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.050.000	3.875.000
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.955.511.784	1.869.899.520
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.083.000	188.428.010
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.083.000	188.428.010
Persentase tata Kelola Aset dan Keuangan				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	798.990.000	771.171.500
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	40.100.000	38.000.900



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.286.386	50.451.100
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kabupaten/kota	171.286.386	50.451.100
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	59.729.865	56.249.735
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.729.865	56.249.735
			Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	547.931.183	543.197.950
				a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	147.066.220	146.612.800
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400.864.963	396.585.150



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	396.801.745	395.018.050
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.299.670	111.228.850
				b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkatdaerah Kab/Kota	61.437.550	61.437.550
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,77	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	165.394.600	159.183.550
				a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG	88.599.650	85.388.600
	b. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG	76.794.950		73.794.950		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,16		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	970.557.300	780.666.071
				a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	970.557.300	780.666.071



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota b. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota	63.154.640	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.493.300	47.493.300
			a	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.062.300	10.062.300
				b. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37.431.000	37.431.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.818.190	126.508.550
			a	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualiyas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.893.690	70.584.050
			b	b. Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	55.924.500	55.924.500



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	93.449.130	83.457.500
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	93.449.130	83.457.500
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	175.553.614	28.511.000
				a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.553.614	28.511.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	96.718.244
				a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pembangunan bagi Perempuan Korban Kekerasan	101.660.000	96.718.244



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Kewenangan Kabupaten/Kota		
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indek Pembangunan Keluarga i-Bangga	57,18	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,908.699.030	3.781.071.750
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360.000.000	235.280.000
				b. Sub Kegiatan Orientasi Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	26.999.030	24.091.750
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	3.521.700.000	3.521.700.000
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.000.000	9.000.000
				a. Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	9.000.000	9.000.000



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga /UPPKS		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya local</p> <p>a. Sub Kegiatan Advokasi Program KBKK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja</p> <p>b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBKK sesuai kearifan budaya local</p> <p>c. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KBKK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p> <p>d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBKK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)</p> <p>e. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBKK</p> <p>f. Sub Kegiatan Pengendalian Program KBKK</p>	757.777.500	751.589.700
					84.370.500	83.646.000
					201.434.800	199.783.200
					150.000.000	150.000.000
					113.900.000	113.620.000
					88.474.700	85.223.000
					119.597.500	119.317.500
				Pendaya gunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	163.253.200	153.410.000
				a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	77.253.200	67.410.000
				b. Sub Kegiatan	86.000.000	86.000.000



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerahKabupaten/kota	2.003.366.000	935.156.293
				a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	72.900.000	67.500.000
				b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.860.238.000	811.528.293
				c. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	38.100.000	24.240.000
				d. Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	32.038.000	31.888.000
				Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	71,000,000	70.368.000
				a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	8.928.000
				b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBKK di Kampung KB	62.000.000	61.440.000



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	411.251.320	409.399.800
				a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.002.800
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	239.651.320	237.997.000
				c. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	101.400.000	101.400.000
				d. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6.000.000	6.000.000

Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Denpasar memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota direalisasikan sesuai dengan kasus yang terlapor dan tertangani
- b. Sub Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Akseptor yang dicapai tidak memenuhi target yang terdapat pada Pagu di DPA karena target terlalu tinggi dari pusat (Dana DAK), Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Dana BOKB) tidak dapat diberikan kepada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Wangaya) dan Puskesmas, APD dan BMHP diberikan sesuai pelayanan
- c. Sub kegiatan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keuangan SILPA karena efisiensi harga BKB Kit
- d. Masih terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap target sasaran yang tercantum pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perencanaan Strategis (RENSTRA OPD) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Adapun pencapaian kinerja diperoleh dari 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja dimana sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan merupakan Strategi Kota Denpasar yang tercantum dalam RPJMD dengan 2 Indikator “angka IPG, angka IDG ” telah memenuhi target dan di atas target yang telah ditetapkan (IPG dan IDG).

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar telah terlaksana dengan baik. Sampai dengan tahun 2023 dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah mencapai target dengan interpretasi yang meningkat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran dan 4 (Empat) indikator kinerja 4 indikator diatas target yang telah di tetapkan dapat disimpulkan 100 % telah mencapai interpretasi yang meningkat dimana berada pada rentang nilai > 85-100%.



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.2 Saran

Dengan Laporan Kinerja ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Untuk mempertahankan pencapaian indikator sasaran, maka diperlukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Mengingat semakin besarnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, maka diperlukan dukungan dana yang berkesinambungan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Mengingat adanya kesamaan tujuan dan sasaran antara program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama secara terpadu dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar , semoga laporan ini bermanfaat dalam memberikan informasi untuk pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati.M.Si
Perbina Utama Muda
NIP.19660311 199503 2 001

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/ 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg.RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LNRI Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar 2016-2021.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2021-2026 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar



Dra. Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR
TANGGAL : JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3 / 54 / DP3AP2KB / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kelompok Kerja :
 - Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001